

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (PSAK 109) PADA LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL POS Keadilan PEDULI UMMAT CABANG KENDARI

SALMAN AL FARISI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (PSAK 109) PADA LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL POS Keadilan PEDULI UMMAT CABANG KENDARI

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SALMAN AL FARISI
A31115719**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (PSAK 109) PADA LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL POS KEADILAN PEDULI UMMAT CABANG KENDARI

disusun dan diajukan oleh

**SALMAN AL FARISI
A31115719**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19651127 199103 2 001

Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA.
NIP 19650219 199403 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19650925 199002 2 001

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (PSAK 109) PADA LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL POS KEADILAN PEDULI UMMAT CABANG KENDARI

disusun dan diajukan oleh

SALMAN AL FARISI
A31115719

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 Januari 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA.	Ketua	1
2.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA.	Sekretaris	2
3.	Drs. Muhammad Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA.	Anggota	3
4.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M.	Anggota	4

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Salman Al Farisi
NIM : A31115719
jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
(PSAK 109) PADA LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL POS Keadilan
PEDULI UMMAT CABANG KENDARI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 70).

Makassar, 1 November 2016

Yang membuat pernyataan,

Salman Al Farisi

PRAKATA



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam dipanjatkan untuk junjungan kami, Nabi Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Terimakasih disampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan kepercayaannya untuk menyusun skripsi ini. Semoga ilmu yang telah beliau berikan dapat bermanfaat.

Terima kasih pula disampaikan kepada Kepala Cabang dan Kepala Bidang Keuangan dan IT PKPU Cabang Kendari atas kesempatan yang diberikan untuk meneliti di PKPU Cabang Kendari. Semoga usaha PKPU Kendari dalam mendayagunakan zakat dan sedekah beroleh balasan di dunia dan akhirat kelak.

Terakhir saya persembahkan banyak terima kasih kepada adinda tercinta Tutus Sri Zulfihijjah yang setia menemani berjuang. Tak lupa ucapan hormat dan salam kepada kedua ibu bapak atas doa tulus yang senantiasa mendampingi.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti bukan dari para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 1 November 2016

Peneliti

ABSTRAK

**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada
Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang
Kendari**

**Application Analysis of Accounting Zakat, Infaq, and Sadaqah to
Amil Zakat Institution (PSAK 109) on Branch Office Lembaga Kemanusiaan
Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Kendari**

Salman Al Farisi
Nirwana
Muhammad Ashari

LKN PKPU Cabang Kendari adalah lembaga nirlaba milik yang aktivitasnya adalah melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) ke kaum dhuafa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah yang dilakukan LKN PKPU Cabang Kendari dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 109. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa LKN PKPU Cabang Kendari secara umum telah menerapkan akuntansi zakat dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Namun LKN PKPU Cabang Kendari belum mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan oleh PSAK 109 untuk diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kata Kunci: akuntansi zakat, laporan keuangan, PSAK No. 109.

LKN PKPU Branch Office Kendari is non-profit organization which are collecting and distribution ZISWAF Fund to poor society directly. This study is shall indeed to find out the application of ZISWAF Fund which is organized by LKN PKPU Branch Office Kendari and to investigate it whether the implementation have meet the with the reference of SFAS No. 109. This Study is qualitative research with collecting data methods using interview, documentation, and observation. Generally, the whole application which undertake by LKN PKPU Branch Office Kendari is truly meet with the reference of PSAK No. 109, it will be gained of written proven by recognition, measurement, and performing. But there are uncomplish disclosure on PKPU Kendari's note of financial statement based on PSAK No 109.

Keywords: accounting of zakat, financial statements, SFAS No. 109.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Dasar Zakat dan Infak/Sedekah	9
2.1.1 Pengertian Zakat dan Infak/sSedekah	9
2.1.2 Syarat Kekayaan Wajib Zakat	11
2.1.3 Orang yang Berhak Menerima Zakat	11
2.1.4 Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat	13
2.1.5 Jenis-Jenis Zakat	14
2.2 Organisasi Pengelola Zakat	20
2.2.1 Definisi Organisasi Pengelola Zakat	20
2.2.2 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	21
2.2.3 Karakteristik Lembaga Zakat	22
2.3 Konsep Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	24
2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat	24
2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat	26
2.4 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dalam PSAK 109.....	27
2.4.1 Karakteristik	27
2.4.2 Pengakuan dan Pengukuran	28

2.4.3 Penyajian	34
2.4.4 Pengungkapan	34
2.4.5 Laporan Keuangan Amil	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Rancangan Penelitian	42
3.2 Kehadiran Peneliti	42
3.3 Lokasi Penelitian	42
3.4 Jenis dan Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data	45
3.7 Pengecekan Validitas Data	46
3.8 Tahap-tahap Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1.1 Profil dan Sejarah Singkat PKPU Cabang Kendari	48
4.1.2 Visi dan Misi	49
4.1.3 Struktur Organisasi	49
4.1.4 Program Kerja	51
4.2 Prosedur Penghimpunan Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah dan Penyusunan Laporan Keuangan pada PKPU Cabang Kendari.....	53
4.2.1 Prosedur Penghimpunan Dana	53
4.2.2 Prosedur Pendayagunaan Dana	58
4.2.3 Penyusunan Laporan Keuangan pada PKPU Cabang Kendari	60
4.3 Pembahasan.....	62
4.3.1 Evaluasi Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada PKPU Cabang Kendari	62
4.3.2 Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada PKPU Cabang Kendari Sesuai dengan PSAK 10	67
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
5.2 Keterbatasan	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Nishab Zakat Unta.....	17
2.2	Nishab Zakat Sapi dan Kerbau.....	18
2.3	Nishab Zakat Kambing atau Domba.....	19
2.4	Neraca (Laporan Posisi Keuangan).....	37
2.5	Laporan Perubahan Dana.....	39
2.6	Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	41
4.1	Laporan Posisi Keuangan PKPU Cabang Kendari.....	74
4.2	Laporan Perubahan Dana Amil PKPU Cabang Kendari.....	75
4.3	Laporan Arus Kas PKPU Cabang Kendari.....	75
4.4	Laporan Aset Kelolaan PKPU Cabang Kendari.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang menjadi sumber dana kegiatan masyarakat Islam. Ibadah zakat ini mempunyai wujud ketakwaan bagi yang menunaikannya dan merupakan unsur kedermawanan dari kaum muslimin yang memperoleh rezeki lebih dari Allah kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu.

Kedudukan zakat dalam Islam begitu penting. Hal ini terlihat di dalam Alqur'an yang menyebutkan berkali-kali perintah zakat, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah: 43, yang artinya : "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat". Al-Qur'an menekankan pentingnya zakat dalam Islam hingga didalam suatu ayat yang menerangkan tentang zakat selalu didahului dengan perintah shalat.

Zakat memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya di dalam masyarakat muslim di Indonesia. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam secara demografik dan kultural. Kewajiban zakat, infaq, dan sedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia.

Tradisi pelaksanaan zakat dikalangan muslimin Indonesia sudah sangat lama sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengamalan ajaran agama Islam. Namun hanya zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Zakat maal yang seharusnya potensial kurang mendapatkan perhatian.

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin menyatakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp200 triliun lebih per tahun dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pengumpulan zakat seluruh badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) saat ini belum maksimal, hanya sekitar 15% dari potensi tersebut. Faktor pemahaman, sosialisasi yang masih kurang, kepercayaan terhadap BAZ/LAZ, keterbukaan dan faktor program lainnya yang masih dinilai masih kurang menjadi sebab rendahnya penghimpunan zakat. (www.antaranews.com).

Faktor ketidakpercayaan muzaki terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ) menjadi faktor salah satu faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya pengumpulan zakat. Hal tersebut salah satunya disebabkan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak organisasi pengelola zakat (OPZ), serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial sehingga perlu pengaturan tersendiri perlakuan akuntansinya yang bersifat standar sebagaimana dalam transaksi komersial lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam istishna'*, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen maju (Utomo, 2007:14).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang peraturan zakat baru yang mengatur tentang zakat yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan undang undang zakat tersebut, Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) yang mengelola bidang

pendidikan, dakwah dan sosial. LAZ dalam menjalankan semua program pengelolaan dana zakat harus senantiasa mengacu pada standar yang telah dibuat oleh pemerintah.

LAZ adalah lembaga publik yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Pemerintah (UU No.23 Tahun 2011 pasal 7 ayat 3). Hal tersebut mengakibatkan diperlukannya standarisasi pelaporan agar publik dan pemerintah dapat melihat dan menilai pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada LAZ.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada Oktober 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG/*good governance* yang meliputi *transparency*, *responsibility*, *accountaility*, *fairness*, dan *indepenency* (Utomo, 2007:14).

Namun dewasa ini permasalahan muncul terkait penerapan PSAK 109 pada LAZ. Tidak semua LAZ memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Diantara permasalahan yang dominan muncul adalah pengakuan akuntansi dengan metode cash basis, penggabungan dana zakat dan non zakat menjadi satu dalam laporan keuangan, ketidakpahaman LAZ mengenai pembagian porsi dana zakat dan dana amil, dan bahkan terdapat LAZ yang belum memahami mengenai pelaporan keuangan yang wajib dipublikasikan (Cahyadi, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 73 mewajibkan seluruh lembaga amil zakat untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah. Laporan tersebut meliputi laporan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bagi LAZ yang tidak melakukan pelaporan sesuai aturan tersebut maka akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, sampai pencabutan izin operasional suatu LAZ.

Salah satu LAZ nasional di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat (LKN PKPU). LKN PKPU merupakan organisasi nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, dengan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan/lembaga. LKN PKPU berkembang tidak hanya ke seluruh wilayah Indonesia tapi juga ke luar negeri melalui program kerja yang konsisten dan sistem pengelolaan zakat yang terpercaya. LKN PKPU Cabang Kendari merupakan salah satu cabang PKPU diantara puluhan cabang LKN PKPU yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. LKN PKPU Kendari sejak Tahun 2014 mulai menggunakan PSAK 109 sebagai standar pelaporan keuangannya.

LKN PKPU Kendari berada di kota yang relatif kecil namun dengan potensi zakat yang besar. Potensi zakat yang besar tersebut belum dapat secara optimal dimanfaatkan oleh LKN PKPU Cabang Kendari. Penghimpunan zakat,

infak, dan sedekah (ZIS) LKN PKPU Cabang Kendari pada Tahun 2015 hanya sekitar 1,8 Miliar Rupiah. Salah satu penyebab rendahnya penghimpunan ZIS menurut kepala Cabang LKN PKPU Tahun 2015 adalah kurangnya sosialisasi program dan transparansi pengelolaan zakat yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji tentang penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LKN PKPU Cabang Kendari dan mengevaluasi kesesuaian penerapan Akuntansi zakat dan infak/sedekah tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 109 yang merupakan replikasi dari penelitian Abdul Aziz (2014) dengan judul Analisis Penerapan PSAK Nomor 109 (Studi Analisis pada Rumah Zakat Cabang Semarang), melalui sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari”**.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang dilakukan oleh para akademisi. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan judul penelitian yang relatif sama namun dengan objek yang berbeda. Penelitian yang dilakukan para peneliti tersebut penulis gunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini. Diantara peneliti yang meneliti mengenai permasalahan akuntansi zakat adalah Andi Metari Setiariware (2013), Ifa Arifatus Sholihah (2014), dan Abdul Aziz (2014). Ketiga peneliti tersebut membahas mengenai bagaimana penerapan akuntansi zakat pada lembaga zakat yang menjadi objek penelitian yang berbeda satu sama lain. Hasil penelitian yang mencakup permasalahan penerapan akuntansi zakat pada LAZ ketiga peneliti tersebut adalah penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai, LAZ yang tidak menyusun salah satu laporan yang disyaratkan, dan LAZ yang tidak melakukan pemisahan pencatatan dana sesuai PSAK 109.

Penelitian yang akan dilakukan penulis sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Penulis tetap memfokuskan penelitian penerapan akuntansi zakat pada PKPU Cabang Kendari dengan ditambah pembahasan mengenai bagaimana penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat dan infak/sedekah sesuai dengan dengan syariat, pendapat ulama, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu penelitian ini dilakukan setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang merupakan aturan pelaksanaan tentang Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih jelas dan rinci tentang kewajiban LAZ terkait pelaporan serta sanksi akibat kelalaian LAZ dalam memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Kendari?
2. Apakah penerapan Akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Kendari telah sesuai dengan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Kendari.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Kendari telah

sesuai dengan PSAK 109.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak terkait. Diantara kegunaan tersebut antara lain.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah sarana untuk melihat sejauh mana teori-teori yang terkait dalam pengelolaan zakat dan pelaporannya dapat diterapkan oleh lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada organisasi pengelola zakat, khususnya Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Kendari dalam penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK 109 secara benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangannya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam hal akuntansi zakat dan infak/sedekah dan juga menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab akan berisi pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, serta pengelolaan zakat yang baik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi zakat pada objek penelitian secara deskripsi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan disajikan kesimpulan serta saran terkait dengan pembahasan dan permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Zakat dan Infak/Sedekah

2.1.1 Pengertian Zakat dan Infak/Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan merupakan unsur dari Rukun Islam. Infak dan Sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah.

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam islam. Al-qur'an menggambarkan urgensi zakat dengan menyebutkannya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya (Zainuddin, 2013:43).

Rasyid (2014:192) menyatakan tentang zakat sebagai berikut.

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakay* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Kata *zaka* dalam bahasa arab mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut agama islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Al Zuhayly (1997:83) menyatakan tentang zakat sebagai berikut.

Zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan harta tersebut penuh dan mencapai satu tahun. Sebagian yang khusus adalah harta tertentu yang wajib dizakati.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Harta yang dikeluarkan zakatnya

akan menjadi tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan bersih (Hafidhuddin, 2008:7).

Zakat adalah salah satu Rukun Islam dan merupakan Rukun Islam yang berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi diantara umat Islam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak yang menerima sesuai syariat Islam sedangkan Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pernyataan Standar Akuntansi 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Infak/sedekah menurut PSAK 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Zakat, berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan penulis adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki kepada mustahik apabila telah mencapai nishab sesuai syariat Islam sedangkan infak/sedekah adalah harta yang dikeluarkan kepada seseorang dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Zakat sifatnya wajib dan jumlahnya ditentukan oleh syariat sedangkan infak/sedekah sifatnya sukarela/sunnah dan tidak dibatasi jumlah maupun waktu penyalurannya.

2.1.2 Syarat Kekayaan Wajib Zakat

Zakat sebagai salah satu Rukun Islam diikat oleh aturan-aturan tentang syarat kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yasin (2011:15-18) menyebutkan ada enam syarat kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

a. Kepemilikan sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya.

b. Berkembang

Harta yang berkembang adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

c. Mencapai nishab

Nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Nishab zakat berbeda-beda untuk kategori harta yang wajib dizakati. Harta yang tidak mencapai nishab maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Jika kebutuhan minimal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, dan pendidikan.

e. Terbebas dari utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nishab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nishab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat.

f. Kepemilikan satu tahun penuh

Persyaratan kepemilikan sudah berlalu selama 12 bulan *qomariyah* hanya berlaku untuk ternak, uang, dan harta benda yang diperdagangkan. Tapi hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan) tidak dipersyaratkan setahun.

2.1.3 Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima harta zakat terbagi atas delapan *ashnaf* (golongan), yaitu fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, dana untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang (*gharimin*), di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan *ibnu sabil*. Firman Allah *Subhanuwata'ala* dalam Al-qur'an Surat At Taubah ayat 60 yang artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Penjelasan delapan *ashnaf* orang yang berhak menerima zakat menurut

Ash-shiddieqy (2010:147) adalah sebagai berikut:

- a. Fakir adalah orang yang menghajati pertolongan yang perlu ditolong dalam menyelenggarakan keperluan hidupnya sehari-hari yang tidak dapat tidak untuk keperluan hidupnya.
- b. Miskin adalah orang fakir yang bersifat tenang dan tidak meminta-minta.
- c. Amil adalah kelompok yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka.
- d. *Muallaf* adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya atau dimantapkan hatinya kepada islam. *Muallaf* dibagi menjadi yang telah masuk islam dan yang belum masuk islam.
- e. Memerdekakan budak, artinya bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan semua bentuk sistem perbudakan.
- f. *Gharimin* adalah kelompok orang yang berutang yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.
- g. *Fisabilillah* adalah orang yang dalam berjuang di jalan Allah SWT, untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan islam, pembangunan masjid dan syiar da'i.
- h. *Ibnu Sabil* adalah orang yang kehabisan belanja/bekal dalam perjalanan yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli bekal diperjalanannya tersebut.

2.1.4 Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Diantara *ashnaf* yang berhak menerima zakat, terdapat orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Al Muhsin (2011:75-78) menyebutkan ada lima golongan yang tidak menerima zakat, yaitu:

- a. Orang kaya, adalah orang yang dapat memenuhi kebutuhannya dan memiliki kecukupan untuk dirinya sendiri dan keluarga yang dibawah tanggungannya.
- b. Orang kuat dan dapat mencari penghasilan, adalah orang yang masih kuat untuk mencari penghasilan dan tidak cacat tubuhnya. Namun golongan ini masih dapat menerima zakat apabila termasuk dalam orang yang berhutang (*gharimin*), *fisabilillah*, amil zakat, *muallaf*, dan *ibnu sabil*.
- c. Orang kafir, orang kafir tidak berhak menerima zakat kecuali terhadap orang kafir yang ingin dilunakkan hatinya (*muallaf*).
- d. Orang yang dibawah tanggungan, zakat tidak diberikan kepada orang yang masih dalam tanggungan untuk dinafkahi. Seorang

ayah tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya dan tidak pula seorang anak memberikan zakat kepada ayahnya.

- e. Ahlu Bait, ialah keluarga Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam Bani Hasyim dan Bani Al-Muthalib.

2.1.5 Jenis-Jenis Zakat

Terdapat dua jenis zakat dikeluarkan oleh orang islam yaitu zakat fitrah (*nafs*) dan zakat harta (*maal*).

a. Zakat Fitrah (*nafs*)

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa, istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah dapat membersihkan kesia-siaan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa (Al Muhsin, 2011:89). Besaran yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah 3,1 liter makanan yang mengenyangkan yang berlaku pada suatu negeri. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah pada bulan Ramadhan (Rasyid, 2014:207).

b. Zakat Harta (*maal*)

Zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat harta terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1) Zakat emas dan perak

Syariat Islam memandang emas dan perak merupakan harta yang potensial disamping dapat berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas dan perak juga dapat berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Hal tersebut menjadikan syariat Islam memandang perlunya dikeluarkan zakat emas dan perak.

Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib di keluarkan zakatnya adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai satu nishab, dan samapai satu tahun disimpan/dimiliki (Rasyid, 2014:195). Nishab (batas minimal) zakat emas adalah sebesar 85 gram sedangkan zakat perak adalah sebesar 595 gram. Keduanya harus dimiliki selama satu tahun sebelum dikeluarkan zakatnya dengan kadar zakatnya 2,5% (Al Muhsin, 2011:43).

2) Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian setiap kali panen. Al Muhsin (2011:54-56) mengutarakan bahwa zakat pertanian memiliki ketentuan diantaranya:

- a) Nishab zakat pertanian adalah 653 kg beras.
- b) Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan).
- c) Dikeluarkan ketika panen.

3) Zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Nishab harta perniagaan adalah menurut komoditasnya. Apabila komoditas perniagaan tersebut adalah emas maka nishabnya mengikuti nishab emas yaitu 85 gram (Rasyid, 2014:197). Ketentuan zakat perniagaan menurut Al Muhsin (2011:45) adalah sebagai berikut:

- a) Nishab zakat niaga adalah senilai dengan 85 gram emas.
- b) Usaha tersebut telah berjalan selama satu tahun.
- c) Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%.
- d) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang.

4) Zakat profesi

Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab. Profesi tersebut dapat meliputi karyawan, dokter, notaris, dan lain sebagainya. Nishab zakat profesi adalah disetarakan dengan 653 kg makanan pokok dengan kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Yasin, 2011:35).

5) Saham dan Obligasi (Investasi)

Zakat saham dan obligasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pembelian saham dan obligasi. Zakat investasi dikeluarkan dari nilai investasi ditambah dengan keuntungan. Nishab dan kadarnya sebesar 85 gram emas dan 2,5% dari total investasi dan keuntungan (Al Muhsin, 2011:65).

6) Zakat hadiah

Hadiah adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah ia sukses dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun didapatkan secara cuma-cuma. Nishab zakat hadiah adalah sebesar 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dari hadiah yang diterima (Yasin, 2011:40).

7) Zakat peternakan

Rasyid (2014:194) menentukan syarat-syarat ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah milik yang sempurna, mencapai nishab, dimiliki selama satu tahun, dan digembalakan.

Jenis hewan yang menjadi objek dalam zakat peternakan beserta nishabnya menurut Rasyid (2014:198-200) adalah sebagai berikut:

a) Unta

Nishab unta adalah 5 (lima) ekor yang berarti apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakat tersebut semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat unta sebagai berikut:

Tabel 2.1 Nishab Zakat Unta

Nishab	Zakat
5 – 9	1 ekor kambing umur 2 tahun lebih atau 1 ekor domba umur 1 tahun lebih.
10 – 14	2 ekor kambing umur 2 tahun lebih atau 2 ekor domba umur satu tahun lebih.
15 – 19	3 ekor kambing umur 2 tahun lebih atau 3 ekor domba umur 1 tahun lebih.
20 – 24	4 ekor kambing umur 2 tahun lebih atau 4 ekor domba umur 1 tahun lebih.
25 – 35	1 ekor anak unta berumur 1 tahun lebih.
36 – 45	1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih.
46 – 60	1 ekor anak unta berumur 3 tahun lebih.
61 – 75	1 ekor anak unta berumur 4 tahun lebih.
76 - 90	2 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih.
91 – 120	2 ekor anak unta berumur 3 tahun lebih.
121	3ekor anak unta berumur 2tahun lebih.

Mulai dari 121 ekor unta dihitung zakatnya setiap 40 ekor unta yang zakatnya satu ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih dan setiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi apabila seseorang memiliki 130 ekor unta maka zakatnya 2 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih dan 1 ekor anak unta berumur 3 tahun lebih. Sedangkan apabila seseorang memiliki 140 unta maka

zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih dan 2 ekor anak unta berumur 3 tahun lebih. Apabila seseorang memiliki 150 unta maka zakatnya 3 ekor anak unta berumur 3 tahun lebih.

b) Sapi dan kerbau

Nishab kerbau disetarakan dengan nishab sapi, yaitu 30 ekor. Hal ini berarti apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda), ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud dari Mu'az bin Jabal, maka dapat dibuat tabel kadar zakat sapi dan kerbau sebagai berikut:

Tabel 2.2 Nishab Zakat Sapi dan Kerbau

Nishab	Zakat
30-39	1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 1 tahun lebih.
40-59	1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih.
60-69	2 ekor anak sapi atau kerbau berumur 1 lebih lebih.
70	1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih dan 1 ekor anak sapi atau kerbau berumur 1 tahun lebih.

Selanjutnya untuk setiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya satu ekor sapi atau kerbau berumur satu tahun lebih dan untuk setiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya satu ekor sapi atau satu ekor kerbau berumur 2 tahun lebih. Jadi zakat untuk 80 ekor sapi atau kerbau adalah 2 ekor sapi atau kebau berumur 1 tahun lebih dan ekor sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih.

c) Kambing atau domba

Nishab kambing atau domba adalah 40 ekor. Hal ini berarti apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah

terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat kambing atau domba sebagai berikut:

Tabel 2.3 Nishab Zakat Kambing atau Domba

Nishab	Zakat
40-120	1 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih dan 1 ekor domba betina umur 1 tahun lebih.
121-200	2 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih dan 2 ekor domba betina umur 1 tahun lebih.
201-399	3 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih dan 3 ekor domba betina umur 1 tahun lebih
400	3 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih dan 3 ekor domba betina umur 1 tahun lebih

Mulai dari 400 ekor kambing dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya sesuai dengan tabel diatas dan seterusnya. Jadi 500-599 kambing zakatnya 5 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih atau domba betina umur 1 tahun lebih.

d) Unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan menurut Panduan Zakat Dompot Dhuafa tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar=4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat). Hal ini berarti apabila seseorang beternak unggas/ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira

setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

2.2 Organisasi Pengelola Zakat

2.2.1 Definisi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infak, dan sedekah. Definisi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Peraturan perundang-undangan tersebut mengakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

a. Badan Amil Zakat

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6 UU No.23 tahun 2011). Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Lembaga Amil Zakat

Masyarakat dapat membentuk LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari pemerintah dan harus memenuhi syarat berikut :

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) Memiliki pengawas syariat;
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2.2.2 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Qardhawi (2007:551-552), mengutarakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus :

- a. Beragama Islam;
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat;
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur;
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat;
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- f. Memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya.

Hafidhuddin (2008:97) menyatakan tentang lembaga pengelola zakat sebagai berikut.

Zakat harus dikelola oleh amil (lembaga pengelola zakat) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan yang memadai, dan memiliki waktu untuk mengelolanya. Hal ini bisa dipahami karena zakat adalah satu-satunya ibadah yang

disyariatkan Islam yang dinyatakan secara eksplisit harus ada petugasnya (amil).

Qardhawi (2005:123) menyatakan tentang unsur pengelolaan zakat sebagai berikut.

Pengelolaan zakat harus dikelola secara profesional dengan mengedepankan administrasi yang akuntabel. Administrasi yang akuntabel memiliki beberapa unsur, namun yang paling utama adalah kualitas sumber daya manusia lembaga zakat dan kesinambungan dalam administrasi keuangan.

Lembaga pengelola zakat harus memiliki izin formal sebagai lembaga zakat yang diakui pemerintah (Hafidhuddin, 2008:126). Hal ini akan memberikan keuntungan kepada lembaga tersebut diantaranya:

- a. Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat;
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung dengan para muzakki untuk menerima zakat;
- c. Mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

2.2.3 Karakteristik Lembaga Zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Widodo dan Kustiawan (2001:11) mengutarakan ada tiga karakteristik khusus yang membedakan OPZ dengan organisasi nirlabalainnya, yaitu :

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam;
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf;
- c. Memiliki dewan syari'ah dalam struktur organisasinya.

OPZ perlu memperhatikan beberapa aspek dalam mengelola ZIS. Widodo (2001) menyebutkan prinsip-prinsip operasionalisasi OPZ sebagai berikut:

a. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset yang paling berharga sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Pemilihan amil perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan paradigma amil zakat adalah pekerjaan sampingan menjadi amil zakat adalah sebuah profesi.
- 2) Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, memahami fiqih zakat, mempunyai misi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerja sama dalam tim.

c. Sistem Pengelolaan

OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas;
- 2) Manajemen terbuka;
- 3) Mempunyai rencana kerja (*activity plan*);
- 4) Mempunyai Komite (*lending commitee*);
- 5) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan;

- 6) Diaudit secara berkala;
- 7) Publikasi kepada *stakeholders*;
- 8) Perbaikan terus menerus.

2.3 Konsep Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah

2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang menjadi wilayah dari hukum Islam yang aturan-aturannya bersumber langsung dari Allah *Subhanahu wata'ala*. Penjelasan mengenai pengertian akuntansi zakat terlebih dahulu membahas pengertian akuntansi dan syariah itu sendiri.

Pengertian Akuntansi secara umum menurut *American Accounting Association* (AAA) adalah “proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang berkepentingan”. Akuntansi didefinisikan juga sebagai “suatu aktivitas mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas kemudian menganalisis informasi tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu untuk selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan” (Mufraini, 2006:27).

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) menjelaskan bahwa akuntansi adalah “seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidaknya-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya”. Akuntansi merupakan suatu aktifitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan tentang satuan-satuan ekonomis yang dapat

bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomis (Smith dan Skousen, 1986:2).

Syariah dalam bahasa arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Pengertian terminologi tersebut bermakna “pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah *Subhanahu wata’ala*. untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) didunia” (Nurhayati, 2009:14). Zakat termasuk dalam hukum syariat yaitu hukum yang bersumber dari Allah SWT serta telah menjadi ketetapan-Nya, dimana manusia, telah diberi beban mempelajarinya, lalu menjalankan hukum-hukum itu, serta berkewajiban juga untuk mengajarkan hukum-hukum tersebut (Sarwat, 2012:46).

Mursyidi (2006:107) mengatakan mengenai akuntansi zakat sebagai berikut.

Akuntansi zakat mencakup proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan sebagai objek zakat, pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, pengukuran dan penetapan nilai objek zakat, serta pelaporan hasil pengukuran objek zakat.”

Husein As-Syahatah (2004:29-30) menyatakan mengenai akuntansi zakat sebagai berikut.

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta yang wajib di zakati serta menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Akuntansi zakat berpedoman pada dua dasar utama yaitu hukum dan dasar-dasar zakat harta (fiqih zakat) dan dasar-dasar akuntansi bagi penghitungan zakat.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam akuntansi zakat harus sesuai dan berdasarkan dengan Syariah Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, (2013:46) menyatakan “prinsip tersebut harus distrukturkan

sesuai dengan konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi secara ekspisit maupun implisit dalam rangka memenuhi kewajiban membayar zakat”.

Akuntansi zakat menurut penulis dapat disimpulkan adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat

Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)

menyatakan tujuan akuntansi zakat sebagai berikut.

Tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2003) adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Mahmudi (2003) menyatakan “Informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja”

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. “Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima” (Mahmudi, 2003).

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. “Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja” (Mahmudi, 2003). Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial

Tujuan akuntansi zakat menurut penulis adalah memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.4 Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah dalam PSAK 109

2.4.1 Karakteristik

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nishab, haul (baik yang periodik maupun yang tidakperiodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

- b. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2.4.2 Pengakuan dan pengukuran

2.4.2.1 Zakat

a. Pengakuan Awal Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat.

Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Pencatatan bentuk kas

Kas - Dana Zakat	xxx
Dana Zakat	xxx

Pencatatan bentuk nonkas

Aset non kas	xxx
Dana Zakat	xxx

- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 3) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Dana Zakat	xxx
Dana Zakat-Amil	xxx
Dana Zakat-non amil	xxx

- 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 5) Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Kas-Dana Zakat	xxx
Dana Zakat-Amil	xxx

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

- 1) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- 2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Dana Zakat-Non amil	xxx
Aset Nonkas	xxx

Namun apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian amil maka pencatatannya sebagai berikut:

Dana-Amil Kerugian	xxx
Aset Non kas	xxx

c. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas.

Dana Zakat-Non amil	xxx
Kas-Dana Zakat	xxx

jumlah yang tercatat jika dalam bentuk nonkas.

Dana Zakat-Non amil	xxx
Aset Non kas-Dana Zakat	xxx

2.4.2.2 Infak/Sedekah

a. Pengakuan Awal

- 1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

Kas - Dana Infak/Sedekah	xxx
Dana Infak/sedekah	xxx

Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas;

Aset Nonkas (nilai wajar)-Lancar Dana Infak	xxx
Aset Nonkas (nilai wajar)-Tidak Lancar Dana Infak	xxx
Dana Infak/Sedekah	xxx

- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

- 3) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah	xxx
Dana Infak/Sedekah-Amil	xxx
Dana Infak/Sedekah-Nonamil	xxx

- 4) Penentuan jumlah atau prosentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

- 1) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- 2) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal saat mengakui penyusutan aset tidak lancar:

Dana-Non amil	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Non lancar	xxx

- 3) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulan.
- 4) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 5) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil:

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah-Nonamil	xxx
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah	xxx

kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dana-Kerugian	xxx
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah	xxx

- 6) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 7) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Jurnal:

Kas/Piutang-Infak/Sedekah	xxx
Dana Infak/Sedekah	xxx

c. Penyaluran infak/sedekah

- 1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah-Non amil	xxx
Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx

nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

Dana Infak/Sedekah-Non amil	xxx
Aset Non kas-Dana Infak/Sedekah	xxx

- 2) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal :

Dana Infak/Sedekah	xxx
Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx

- 3) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

Jurnal :

Piutang-Dana Infak/Sedekah	xxx
Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx

2.4.2.3 Dana Non Halal

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.4.3 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.4.4 Pengungkapan

2.4.4.1 Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - 1) Sifat hubungan istimewa
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - 3) Prosentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

2.4.4.2 Infak/sedekah

- a. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- 7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- 8) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- 9) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi;
 - (a) Sifat hubungan istimewa;
 - (b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

- (c) Prosentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- b. Selain membuat pengungkapan di paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:
 - 1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
 - 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.4.5 Laporan Keuangan Amil

2.4.5.1 Komponen Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan amil terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan);
- b. Laporan perubahan dana;
- c. Laporan perubahan aset kelolaan;
- d. Laporan arus kas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan

2.4.5.2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuandalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset
 - 1) Kas dan setara kas
 - 2) Instrumen keuangan
 - 3) Piutang

- 4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- b. Kewajiban
 - 1) Biaya yang masih harus dibayar
 - 2) Kewajiban imbalan kerja
- c. Saldo dana
 - 1) Dana zakat
 - 2) Dana infak/sedekah
 - 3) Dana amil
 - 4) Dana non halal

Tabel 2.4
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ XXX
Per 31 Desember 2xxx

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban jangka panjang	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

2.4.5.3 Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- a. Dana zakat
 - 1) Penerimaan dana zakat meliputi bagian dana zakat dan bagian amil.
 - 2) Penyaluran dana zakat meliputi entitas amil lain dan mustahik lain.
 - 3) Saldo awal dana zakat
 - 4) Saldo akhir dana zakat
- b. Dana infak/sedekah
 - 1) Penerimaan dana infak/sedekah
 - 2) Penyaluran dana infak sedekah
 - 3) Saldo awal dan infak/sedekah
 - 4) Saldo akhir dana infak/sedekah
- c. Dana amil
 - 1) Penerimaan dana amil mencakup bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, dan penerimaan lainnya.
 - 2) Penggunaan dana amil
 - 3) Saldo awal dana amil
 - 4) Saldo akhir dana amil
- d. Dana non halal
 - 1) Penerimaan dana nonhalal mencakup bunga bank, jasa giro, dan penerimaan lainnya.
 - 2) Penyaluran dana non halal.
 - 3) Saldo awal dana non halal.
 - 4) Saldo akhir dana non halal.

Tabel 2.5
Laporan Perubahan Dana
BAZ XXX
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xxx

Keterangan	Jumlah
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx

Keterangan	Jumlah
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

2.4.5.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Tabel 2.6
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ xxx
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xxx

	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana infak/ sedekah - aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

2.4.5.5 Laporan Arus Kas

Entitas amal menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

2.4.5.6 Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis yang menonjolkan proses dan makna dari perspektif subyek. Sugiyono (2010:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti gejala yang bersifat holistik terkait situasi sosial yang meliputi aspek lokasi, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis dimana posisi peneliti sebagai instrumen kunci.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Peneliti ikut terlibat dalam memperoleh data dan melakukan pengolahan data. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan penuh dan peneliti bertindak sebagai subjek penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari (LKN PKPU Cabang Kendari), yang secara khusus memberikan layanan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di LKN PKPU Cabang Kendari yang berlokasi di Jalan A.H. Nasution Nomor 39 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan kumpulan data non angka yang bersifat deskriptif, seperti :

- a. Gambaran umum entitas (LKN PKPU Cabang Kendari) termasuk sejarah dan perkembangan serta struktur organisasi dan pembagian tugas.
- b. Dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah pokok penelitian penelitian, seperti laporan keuangan, pencatatan akuntansi, serta kebijakan akuntansi zakat dan infak/sedekah perusahaan.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dalam hal ini data yang dianalisis yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi langsung pada objek penelitian. Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan pimpinan atau pihak manajemen LKN PKPU Cabang Kendari dan laporan keuangan entitas.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya. Serta data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti buku teks tentang lembaga amil zakat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasi diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya (Moleong, 2010:216). Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat OPZ dan laporan pengelolaan dana zakat, dan data kuantitatif yaitu laporan keuangan per Desember 2015.

2. Pengamatan (observasi),

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi memungkinkan peneliti untuk merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga peneliti memungkinkan untuk menjadi sumber data (Moleong, 2010:174).

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih yang berhadaphadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan suaranya, merupakan alat pengumpul informasi (Moleong, 2010:186). Peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pengurus/karyawan atau pimpinan LKN PKPU Cabang Kendari berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet untuk melengkapi informasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data selama di lapangan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2010:91) bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas. Langkah-langkah analisis data model Miles and Huberman adalah sebagai berikut.

- a. *Data Reduction*

Data Reduction atau reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok dan berfokus pada hal-hal yang penting, kemudian menemukan tema dan polanya. Data yang tereduksi akan membantu peneliti lebih mudah melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b. *Data Display*

Data display adalah penyajian data untuk memudahkan peneliti memahami kondisi serta permasalahan yang dijumpai dalam penelitian. Selain dalam bentuk teks naratif, penyajian data kualitatif juga dapat menggunakan grafik, matriks dan *chart* untuk membantu penulis mengidentifikasi data yang relevan dalam penarikan simpulan.

- c. *Conclusion drawing and verification*

Tahapan akhir analisis data adalah proses penarikan simpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan hasil penelitian seharusnya didukung bukti yang

valid dan konsisten agar mendukung kesimpulan yang disajikan dalam laporan penelitian.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Pengecekan validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi yaitu dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang diperoleh. Sugiyono (2010:125) mengungkapkan bahwa tujuan triangulasi adalah menguji kredibilitas data, membuat kesimpulan baru ataupun memperkuat data/kesimpulan yang sudah ada. Data-data yang didapat peneliti selama pelaksanaan penelitian dilapangan seluruhnya dapat dikonfirmasi kepada sumber pengambilan datanya yaitu pada LKN PKPU Cabang Kendari.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Setelah usulan penelitian diterima dan disahkan oleh tempat peneliti terikat secara akademis (Universitas Hasanuddin) maka tahap penelitian yang mula-mula dilakukan peneliti adalah penelitian pendahuluan. Tahap inidilakukan dengan penelitian kepustakaan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan, membaca, menelaah berbagai buku, makalah, jurnal, literatur dan artikel, serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan untuk mendalami teori dan konsep yang ada dan mampu mendukung pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini.

Tahap penelitian selanjutnya adalah pengembangan desain penelitian. Peneliti menggunakan cara penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis yang menonjolkan proses dan makna dari perspektif subyek. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dimana karakteristik masalah yang terjadi pada kehidupan nyata, berkaitan dengan latar belakang dan kondisi dari objek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.

Tahap penelitian selanjutnya adalah penelitian sebenarnya dengan peneliti langsung ke objek penelitian yang berlokasi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti mencoba memperoleh data berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing and verification* untuk memperoleh kesimpulan hasil penelitian.

Tahap terakhir dari penelitian adalah penulisan hasil penelitian yang meliputi seluruh tahapan penelitian dari penelitian pendahuluan sampai diperoleh kesimpulan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Cabang Kendari, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagai berikut.

- a. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan PKPU Cabang Kendari meliputi pengumpulan bukti-bukti transaksi, penginputan transaksi ke aplikasi zakat menjadi jurnal dan akun-akun buku besar, dan penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi di PKPU Cabang Kendari dibantu dengan aplikasi DAF yang memudahkan proses administrasi dan pencatatan akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Laporan Keuangan PKPU Cabang Kendari terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada transaksi maupun akun-akun Laporan Keuangan PKPU Cabang Kendari telah secara umum sesuai dengan PSAK 109. Namun PKPU Cabang Kendari belum mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan oleh PSAK 109 untuk diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu PKPU Cabang Kendari telah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infak/sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

1.2 Saran

- a. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PKPU Cabang Kendari harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja organisasi serta untuk memenuhi ketentuan good governance lembaga amil zakat yang meliputi *transparancy*, *responsibility*, *accountability*, *fairness*, dan *indenpendency*.
- b. PKPU Cabang Kendari merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat menitipkan dananya untuk disalurkan. Maka sebaiknya PKPU Cabang Kendari meminta dilakukan audit oleh auditor independen agar Laporan Keuangan PKPU Cabang Kendari memiliki tingkat *assurance* yang memadai.
- c. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kesesuaian penerapan akuntansi zakat dengan PSAK 109 dan kesesuaian penghimpunan dan pendistribusian zakat dengan prinsip-prinsip syariah. Dari penelitian yang dilakukan peneliti tidak tertutup kemungkinan banyak kekurangan dan kelemahan. Hal tersebut dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian ketika laporan keuangan disusun pada tahun berjalan. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat melihat sistem informasi yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk mendukung proses akuntansi dan pelaporan zakat dan infak/sedekah.

1.3 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak dapat mengobservasi langsung proses pembuatan laporan keuangan Tahun 2015 yang dilakukan oleh

PKPU Cabang Kendari sehingga peneliti tidak dapat memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan proses pembuatan laporan keuangan hingga laporan tersebut telah disusun. Selain itu waktu penelitian yang terbatas membuat peneliti tidak dapat melihat detail rincian proses sistem aplikasi zakat (DAF) PKPU Cabang Kendari berjalan, mulai dari cara penginputan jurnal sampai menjadi akun pada buku besar, cara mengidentifikasi kesalahan input, cara memastikan kebenaran input, hingga detail operasi sistem lainnya. Peneliti hanya memperoleh penjelasan mengenai cara kerja, alur, dan output aplikasi zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Muhsin, Fakhruddin. 2011. *Ensiklopedi Mini Zakat*. Bogor: Darul Ilmi Publishing
- Al Zuhayly, Wahbah. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset.
- As-Syahatah, Husein. 2004. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progresif
- As-Shiddieqy, Muhammad, Hasbi. 2010. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Cahyadi, Amri. 2015. *Permasalahan dalam Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109*. (online)
(http://www.kompasiana.com/muhammad_amri_cahyadi/permasalahan-dalam-penerapan-akuntansi-zakat-psak-109_5581f04023afbd1a0ee10831, diakses tanggal 8 Agustus 2016)
- Departemen Agama RI. 2009. *Syamil Al-Qur'an terjemah*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Direktorat Pemberdayaan Zakat: Jakarta.
- Friedlander, Walter A. 1965. *Concept and Methods of Social Work*. Prentice Hall: New Jersey
- Hafidhuddin, Didin. (Eds). 2008. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press
- _____, Didin. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Mahmudi. 2003. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*, (Online), <http://dokumen.tips/documents/akuntansi-zakat.html>, diakses 10 April 2016)
- Midgley, J. 2000. Globalization, Capitalism and Sosial Welfare: A Sosial Development Perspective. *Canadian Sosial Work, Special Issue: Sosial Work and Globalization*, 2(1):13-28
- Moleong, Lexy, J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mufraini, M, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Nurhayati, Sri, Wasilah. 2009 . *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pernyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109)

Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.

_____,Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta; Zikrul Hakim.

Rasyid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Smith dan Skousen. 1986. *Akuntansi Intermediate Volume Komprehensif*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Syarwat, Ahmad. 2012. *Seri Fiqih Kehidupan (1) Muqoddimah*. Jakarta:Rumah Fiqih Publishing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Utomo, Setiawan Budi. Edisi No. 2, Tahun I, Oktober, 2007. *Akuntansi zakat Sebuah Keharusan*. Majalah Akuntan Indonesia, hlm 14. (online), (<http://www.scribd.com/doc/52734626/akuntan-indonesia-majalah-edisi-02>, diakses 10April 2016).

www.aaahq.org

www.aaoifi.org

www.aicpa.org

Widodo,Hertanto. 2001.*Prinsip-prinsip Operasional Organisasi Pengelola Zakat*, (Online), (http://www.oocities.org/tarjikh/Artikel/prinsip_operasional_org_pengelola_zakat.htm), diakses 10 April 2016)

Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat

- Yasin, Ahmad, Hadi. 2011. *Panduan Zakat Praktis The World of Zakat*. Jakarta: Dompe Dhuafa Republika.
- Zainuddin. 2013. *Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan, dan Keadlian Sosial*. Gowa: Alauddin University Press.
- Zastrow, Charles. 2000. *Introduction to Social Work and Social Welfare*. United States : Brooks Cole

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Salman Al Farisi
 Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Mei 1987
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Rumah : Jl Kemuliaan Bangkala No 80 BTP Makassar
 Telepon : 085756862563, 08133137821
 Alamat Email : thisissalman.alfarisi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- a. Pendidikan Formal
 - Madrasah Ibtidaiyah Ar Rohman Sidoarjo (1993-1999)
 - SMPN 1 Taman Sidoarjo (1999-2002)
 - SMAN 1 Gedangan Sidoarjo (2002-2005)
 - Manajemen Universitas Airlangga (2005)
 - Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005-2008)
 - Akuntansi Universitas Hasanuddin (2015-Sekarang)
- b. Pendidikan Non Formal
 - Bahasa Arab Ma'had Almanar Utan Kayu Utara Jakarta Timur (2009-2010)

Riwayat Pekerjaan

Auditor Pelaksana pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2009-Sekarang)

Pengalaman Organisasi

- a. Kepala Bidang Kerohanian Karang Taruna Desa (2003-2005)
- b. Staf Bidang SDM Masjid An-Nur Jakarta Selatan (2006-2007)
- c. Staf Bidang Administrasi LBB Al Hikmah Jakarta Selatan (2006-2008)

Demikian Biodata ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 2 November 2016

Salman Al Farisi